

## **Pendidikan Politik Sebagai Strategi Ideologisasi pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966)**

Aulia Rahmi<sup>1</sup>, Reno Fernandes<sup>2\*</sup>

Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [renofernandes@fis.unp.ac.id](mailto:renofernandes@fis.unp.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas strategi pendidikan politik pada masa Orde Lama (1959–1966) dalam kerangka Demokrasi Terpimpin yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pendidikan digunakan sebagai sarana ideologisasi untuk memperkuat legitimasi negara dan mengarahkan kesadaran politik masyarakat sesuai garis ideologi resmi. Penelitian ini berfokus pada analisis pendidikan politik sebagai strategi ideologisasi negara dalam kerangka Demokrasi Terpimpin (1959–1966), suatu aspek yang masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur sejarah politik Indonesia. Meski banyak kajian mengenai Demokrasi Terpimpin, belum ada studi yang secara spesifik menelaah pendidikan politik sebagai alat legitimasi ideologi melalui Manipol-Usdek dan TUBAPIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap dokumen sejarah, kebijakan pendidikan, dan literatur ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan politik pada masa ini sarat dengan pendekatan indoktrinatif melalui doktrin seperti Manipol-Usdek dan TUBAPIN. Pendidikan berfungsi sebagai alat kontrol ideologis yang membentuk loyalitas terhadap negara, namun juga membatasi pluralisme politik dan kebebasan berpikir. Studi ini penting sebagai refleksi kritis untuk merumuskan pendidikan politik masa kini yang lebih demokratis, inklusif, dan membangun kesadaran politik warga secara kritis.

Kata Kunci: Demokrasi Terpimpin; Orde Lama; Pendidikan Politik; TUBAPIN.

### **Abstract**

This article discusses political education strategies during the Old Order (1959–1966) within the framework of Guided Democracy initiated by President Soekarno. The main focus of this study is how education was used as a means of ideologization to strengthen state legitimacy and direct public political awareness in line with official ideology. This research focuses on analyzing political education as a strategy of state ideologization within the framework of Guided Democracy (1959–1966), an aspect that has rarely been studied in depth in Indonesian political history literature. Although there have been many studies on Guided Democracy, there has been no specific study examining political education as a tool of ideological legitimization through Manipol-Usdek and TUBAPIN. The research uses a descriptive qualitative approach through a literature review of historical documents, education policies, and related scientific literature. The results of the study show that political education during this period was heavily indoctrinated through doctrines such as Manipol-Usdek and TUBAPIN. Education served as an ideological control tool to foster loyalty to the state, but it also restricted political pluralism and freedom of thought. This study is important as a critical reflection for formulating a more democratic, inclusive, and critical political education for citizens today.

Keywords: Guided Democracy; Old Order; Political Education; TUBAPIN.

How to Cite: Rahmi, A. & Fernandes, R. (2025). Pendidikan Politik sebagai Strategi Ideologisasi pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966). *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1(4), 271-282.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

## Pendahuluan

Setelah mengalami masa demokrasi parlementer yang penuh dinamika dan ketidakstabilan politik, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin (Inayah 2023). Demokrasi Terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1959 hingga 1965. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno dalam sidang Konstituante pada 10 November 1956. Namun, penerapannya secara resmi baru terjadi pada 5 Juli 1959 melalui dikeluarkannya Dekrit Presiden (Widariyanti 2022).

Dekrit presiden ini menandai berakhirnya sistem demokrasi liberal dan kembalinya Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945, serta memberikan kekuasaan yang lebih terpusat di tangan presiden (Hanafi dan Ansorullah 2021). Latar belakang dari keputusan ini adalah ketidakmampuan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, yang menyebabkan krisis politik berkepanjangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Widariyanti 2022). Sistem ini dirancang untuk mengatasi konflik politik yang berkepanjangan dan memperkuat kekuasaan presiden dalam mengarahkan negara sesuai dengan visi nasionalnya. Demokrasi Terpimpin menekankan peran sentral presiden dan upaya mewujudkan persatuan nasional melalui integrasi kekuatan politik utama seperti TNI dan Partai Komunis Indonesia (Hati dan Ginting 2022)

Dalam konteks Demokrasi Terpimpin, sistem politik yang otoriter namun mengusung ideologi nasionalisme dan sosialisme sangat memengaruhi arah pendidikan nasional. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai ideologis yang sesuai dengan arah politik negara. Pendidikan diarahkan untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan karakter bangsa yang sejalan dengan cita-cita Demokrasi Terpimpin (Hati dan Ginting 2022). Hubungan antara politik dan pendidikan di Indonesia bersifat dinamis dan saling terkait, terutama pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Ideologi dan kekuasaan politik secara signifikan memengaruhi arah sistem pendidikan nasional, membentuk kebijakan pendidikan, perubahan kurikulum, dan pendekatan pembelajaran (Subkhan 2018).

(Pendidikan Politik Sebagai...)

Pergeseran dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin secara nyata memengaruhi visi dan tujuan pendidikan (Subkhan 2018). Kompleksitas hubungan ini semakin disorot oleh tantangan yang sedang berlangsung dalam membangun sistem pendidikan nasional yang permanen dan konsensual, yang terkait dengan ketidakstabilan sistem politik nasional. Pendidikan politik memainkan peran penting dalam mengembangkan warga negara dengan budaya politik baru, ide-ide inovatif, dan sikap kritis terhadap sistem politik nasional. Namun, untuk mencapai tujuan ini memerlukan upaya sistematis dan mungkin memerlukan beberapa generasi (Nasiwan 2010)

Pendidikan politik pada masa ini menjadi instrumen strategis untuk ideologisasi masyarakat (Suprayogi dkk. 2024). Melalui kurikulum, propaganda, dan berbagai program pendidikan, pemerintah Orde Lama berupaya mengokohkan legitimasi politiknya dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, anti-imperialisme, dan dukungan terhadap sistem Demokrasi Terpimpin. Pendidikan digunakan untuk membentuk kesadaran politik yang mendukung kekuasaan Soekarno dan mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat ke dalam bingkai ideologi negara yang dikendalikan oleh pemerintah pusat (Hati dan Ginting 2022)

Namun, pendidikan politik pada masa ini tidak lepas dari kontroversi. Di satu sisi, ia memberikan ruang pembelajaran politik bagi masyarakat yang lebih luas, tetapi di sisi lain, ia juga digunakan untuk membatasi pluralisme politik dan menekan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan garis ideologi negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batas antara pendidikan politik yang mencerdaskan dan pendidikan politik yang bersifat hegemonik.

Pendidikan politik pada masa Orde Lama tidak lepas dari kontroversi. Di satu sisi, ia memberikan ruang pembelajaran politik bagi masyarakat secara luas, namun di sisi lain digunakan sebagai alat untuk membatasi pluralisme politik dan menekan kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan ideologi Negara (Tambunan 2020). Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai batas antara pendidikan politik yang mencerdaskan dengan pendidikan politik yang bersifat hegemonik. Penelitian ini berfokus pada analisis pendidikan politik sebagai strategi ideologisasi negara dalam kerangka Demokrasi Terpimpin (1959–1966), suatu aspek yang masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur sejarah politik Indonesia. Meski banyak kajian mengenai Demokrasi Terpimpin, belum ada studi yang secara spesifik menelaah pendidikan politik sebagai alat legitimasi ideologi melalui Manipol-Usdek dan TUBAPIN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kajian pustaka

terhadap dokumen ideologis seperti Manipol-Usdek dan TUBAPIN untuk mengungkap bagaimana pendidikan dimanfaatkan dalam membentuk kesadaran politik yang selaras dengan kepentingan negara. Temuan ini memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara politik dan pendidikan serta relevansinya dalam membangun pendidikan politik yang lebih demokratis di masa kini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai strategi ideologisasi melalui pendidikan politik pada masa Orde Lama (1959–1966) dalam konteks Demokrasi Terpimpin. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yang terdiri dari Artikel ilmiah, dan buku yang dapat diakses melalui platform seperti google scholar. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan juga kredibilitasnya dalam mendukung tema penelitian dari artikel ilmiah dan Buku yang diterbitkan 10 tahun terakhir. Setelah mendapatkan sumber referensi yang relevan peneliti akan melanjutkan dengan analisis data kajian pustaka yang dilakukan menggunakan analisis isi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi pada sumber data yang perlu pengaturan waktu untuk membaca dan menelaah data tersebut sehingga terdapat suatu hasil (Nurjanah dan Mukarromah 2021). Dengan mengkaji dokumen-dokumen sejarah, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama, serta literatur ilmiah yang relevan. Sumber data meliputi arsip resmi, buku sejarah, peraturan pemerintah, pidato politik, dan artikel akademik yang membahas pendidikan politik dan sistem Demokrasi Terpimpin. Data yang terkumpul dianalisis secara interpretatif dengan fokus pada isi kebijakan pendidikan dan praktik pendidikan politik pada periode 1959–1966. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendidikan digunakan sebagai sarana penguatan ideologi dan legitimasi politik dalam sistem Demokrasi Terpimpin, serta strategi ideologisasi yang diterapkan melalui pendidikan politik.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Politik Masa Orde Lama**

##### ***Penerapan kembali UUD 1945 dan lahirnya Demokrasi Terpimpin.***

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pertama kali diberlakukan pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia yang baru merdeka (Supena 2020). Namun, pada periode 1949 hingga 1959, Indonesia mengalami transisi konstitusional

dengan menggunakan UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUD Sementara (UUDS) 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer (Pobela 2023). Sistem parlementer tersebut dianggap tidak stabil karena seringnya terjadi pergantian kabinet dan ketidakmampuan Konstituante untuk menetapkan konstitusi baru (Syafrudin dan Maiwan 2023).

Sebagai respons atas krisis politik tersebut, Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante, menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku, serta menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950 (Hanafi dan Ansorullah 2021) (Badrun 2023). Dekret tersebut juga menetapkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), serta menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin (Rannie 2020).

Penerapan kembali UUD 1945 membuka jalan bagi lahirnya sistem Demokrasi Terpimpin, yakni suatu bentuk pemerintahan yang memusatkan kekuasaan pada presiden dan mengurangi peran partai politik serta lembaga legislatif (Adnan dkk. 2022). Ciri utama dari sistem ini meliputi dominasi kekuasaan eksekutif oleh Presiden Soekarno, berkurangnya peran parlemen dan partai politik, meningkatnya pengaruh militer dan birokrasi dalam pemerintahan, serta pengambilan keputusan yang tersentralisasi pada presiden (Huda 2021).

Secara formal, Demokrasi Terpimpin berlangsung sejak 1959 hingga 1966 dan ditandai dengan pembentukan lembaga-lembaga seperti MPRS dan DPAS, serta pembatasan signifikan terhadap kebebasan politik (Suarlin dan Fatmawati 2022). Dampak dari penerapan sistem ini antara lain adalah meningkatnya kekuasaan eksekutif presiden, berakhirnya sistem multipartai yang bebas, munculnya sentralisasi kekuasaan, serta pengawasan ketat terhadap oposisi dan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (Hati dan Ginting 2022).

Refleksi teoritis terhadap kondisi ini mencerminkan konsep hegemoni ala Antonio Gramsci, di mana negara melalui aparatus ideologisnya termasuk sistem pendidikan dan media, menciptakan kesadaran politik kolektif yang mendukung status quo kekuasaan. Negara tidak hanya menggunakan kekuatan koersif, tetapi juga membentuk konsensus melalui institusi sosial dan pendidikan agar rakyat secara sukarela menerima arah ideologis yang dikehendaki penguasa.

Refleksi teoritis terhadap kondisi yang Anda sebutkan sangat tepat jika dikaitkan dengan konsep hegemoni Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni adalah dominasi kekuasaan yang tidak hanya menggunakan kekuatan koersif, tetapi juga

membentuk konsensus melalui aparatus ideologis negara seperti sistem pendidikan dan media massa. Negara berperan dalam menciptakan kesadaran politik kolektif yang membuat rakyat secara sukarela menerima dan mendukung status quo kekuasaan yang ada (Siswati 2017).

Gramsci menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui kekuatan fisik atau koersif, tetapi melalui pembentukan kesadaran dan konsensus sosial di masyarakat. Institusi sosial dan pendidikan menjadi alat penting dalam proses ini, karena mereka membentuk nilai-nilai, norma, dan pandangan dunia yang mendukung ideologi penguasa. Dengan demikian, rakyat tidak merasa dipaksa, melainkan secara sukarela menerima ideologi dominan sebagai sesuatu yang wajar dan benar (Indrayaningtias, Yudho, dan Fauzi 2022).

Pola sentralisasi ideologi yang diterapkan dalam Demokrasi Terpimpin memberikan pelajaran penting bagi pendidikan politik masa kini. Dalam konteks modern, kondisi tersebut bisa menjadi pengingat akan urgensi menjaga pluralisme, keterbukaan wacana, dan kebebasan berpikir dalam kurikulum pendidikan politik. Dengan demikian, pendidikan politik saat ini tidak boleh terjebak dalam doktrinasi tunggal yang membatasi keragaman pandangan, melainkan harus mendorong dialog kritis yang sehat dan partisipatif.

### ***Peran Sentral Presiden Soekarno dalam Merancang Arah Pendidikan Politik***

Presiden Soekarno memainkan peran yang sangat sentral dalam merancang arah pendidikan politik di Indonesia, khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Pemikiran Soekarno mengenai pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi filosofis yang mengaitkan antara pendidikan nasional, ilmu pengetahuan, ideologi, dan kesejahteraan masyarakat (Darmawan, Mulyana, dan Fauzi 2023). Sebagai kepala negara dan pemerintahan, Soekarno tidak hanya menetapkan kebijakan politik, tetapi juga secara aktif membentuk narasi ideologis yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan politik nasional (Judijanto dkk. 2025). Pendidikan politik diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membentuk kesadaran ideologis rakyat yang sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme, anti-imperialisme, dan sosialisme Indonesia yang menjadi inti dari visi revolusi nasional.

Salah satu manifestasi konkret dari arah pendidikan politik yang dirancang oleh Soekarno adalah penyusunan dan penyampaian Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa Indonesia) pada 5 Juli 1959. Manipol USDEK menjadi pedoman ideologis negara yang digunakan dalam pendidikan politik untuk

membentuk karakter bangsa yang berpijak pada persatuan, kepribadian nasional, dan arah pembangunan yang mandiri (Arka dan Bima 2021). Melalui pendidikan politik ini, Soekarno berupaya menanamkan nilai-nilai sosialisme khas Indonesia yang berbeda dengan komunisme dan kapitalisme, serta menekankan pentingnya keutuhan nasional sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan global (Bakry dkk. 2024). Pendidikan politik juga diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas secara intelektual, berbudi pekerti luhur, dan memiliki semangat kebangsaan yang kokoh.

Selain itu, dalam praktiknya, pendidikan politik era Soekarno diintegrasikan dengan kebijakan strategis nasional, seperti proyek-proyek simbolik yang bersifat monumental, misalnya Proyek Mercusuar, yang tidak hanya merepresentasikan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi alat propaganda untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menarik simpati internasional (Astuti 2023).

Pendidikan politik pada masa ini lebih dari sekadar pemberian informasi politik, lebih berfungsi sebagai alat mobilisasi massa untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan Soekarno dan memastikan kelangsungan revolusi nasional yang dipimpin Soekarno (Hidayat dan Haryono 2023). Namun demikian, arah pendidikan politik tersebut juga tidak lepas dari karakter otoriter sistem Demokrasi Terpimpin, yang ditandai oleh dominasi kekuasaan presiden, terbatasnya peran oposisi, serta pembatasan terhadap kebebasan politik (Astuti 2023). Dengan demikian, meskipun pendidikan politik pada masa ini bertujuan membentuk kesadaran nasional dan memperkuat ideologi negara, ia juga menjadi sarana penguatan kekuasaan dan kontrol politik yang terpusat pada figur Soekarno.

Namun, dari sudut pandang teori hegemoni Gramsci, pendidikan politik dalam kerangka Demokrasi Terpimpin dapat dilihat sebagai bentuk dominasi ideologis negara. Pendidikan tidak hanya menjadi ruang untuk pencerahan, tetapi juga media untuk menginternalisasi nilai-nilai ideologis tertentu yang melanggengkan kekuasaan. Dengan mengendalikan narasi dalam pendidikan, negara membentuk konsensus politik yang mendukung legitimasi kepemimpinan Soekarno. Implikasinya terhadap masa kini sangat penting. Dalam situasi pendidikan politik kontemporer, penting untuk diingat bahwa penguatan ideologi negara tidak boleh menutup ruang bagi keberagaman dan otonomi intelektual. Pola pendidikan yang terlalu tersentralisasi seperti di era Soekarno berpotensi menimbulkan homogenisasi pemikiran dan menghambat tumbuhnya nalar kritis di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan politik saat ini harus dikembangkan secara demokratis, pluralistik, dan reflektif terhadap sejarah.

### **Isi dan Tujuan Pendidikan Politik**

Isi dan tujuan pendidikan politik dalam konteks sejarah dan ideologis Indonesia dapat dijabarkan melalui pendekatan terhadap dokumen-dokumen fundamental negara, terutama TUBAPIN (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) dan Manipol-Usdek (Manifesto Politik-Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) (Darmawan dkk. 2023). Kedua dokumen ini disusun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan berfungsi sebagai instrumen ideologis utama yang bertujuan membentuk kesadaran politik rakyat serta memperkuat arah revolusi nasional.

Tujuh pokok dalam TUBAPIN meliputi Revolusi Indonesia, anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, penolakan terhadap feodalisme, pembangunan masyarakat sosialis, penerapan demokrasi terpimpin, penguatan ekonomi terpimpin, serta pembentukan kepribadian nasional. Keseluruhan isi TUBAPIN dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang sadar akan tugas historis revolusi, berpihak kepada rakyat, serta memiliki karakter ideologis yang kuat.

Setiap unsur dari Manipol-Usdek dirancang untuk memperkuat kepribadian nasional yang berkarakter anti-imperialis dan anti-kolonialis, serta menekankan pentingnya persatuan dan kemandirian dalam pembangunan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Manipol-Usdek difungsikan sebagai pedoman ideologis yang wajib dipahami dan dijadikan acuan oleh seluruh warga negara dan aparat pemerintahan, serta dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan dan pengajaran di berbagai jenjang (Arka dan Bima 2021).

Melalui pendekatan pendidikan politik yang berbasis pada TUBAPIN dan Manipol-Usdek, pemerintah Orde Lama menjadikan proses pendidikan tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membentuk kesadaran ideologis, loyalitas politik, dan karakter kebangsaan. Kurikulum dan metode pengajaran pada masa itu diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai ideologi negara, menjadikan guru dan tenaga pendidik sebagai agen indoktrinasi yang aktif. Pendidikan politik difungsikan sebagai instrumen politik praktis yang revolusioner, guna membentuk warga negara yang tidak hanya memahami cita-cita nasional, tetapi juga siap mendukung pelaksanaan revolusi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dengan demikian, pendidikan politik pada masa itu bertujuan membangun masyarakat ideologis yang berpijak pada semangat nasionalisme, sosialisme Indonesia, dan semangat anti-kolonialisme, yang tetap relevan untuk mendidik generasi penerus bangsa

### **Dampak Pendidikan Politik**

Pendidikan politik pada masa Orde Lama, khususnya antara tahun 1959 hingga 1966, memberikan dampak yang Samar terhadap perkembangan kehidupan politik dan kebudayaan bangsa Indonesia. Di satu sisi, pendidikan politik pada era ini memiliki kontribusi positif dalam membentuk kedewasaan politik masyarakat serta memperkuat identitas nasional (Noor, Hasan, dan Umar 2023). Melalui instrumen seperti TUBAPIN dan Manipol-Usdek, negara berhasil menanamkan semangat nasionalisme, anti-imperialisme, dan kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan pembangunan nasional. Pendidikan politik menjadi sarana efektif untuk membangun karakter ideologis warga negara, menciptakan solidaritas kebangsaan, serta mendorong partisipasi dalam agenda revolusi yang digagas oleh pemerintah.

Namun, di sisi lain, pendidikan politik pada masa Orde Lama juga membawa dampak negatif yang cukup signifikan. Proses indoktrinasi yang sangat terpusat dan dikendalikan oleh negara menyebabkan pengawasan ideologis yang ketat terhadap wacana pendidikan dan kehidupan publik (Hati dan Ginting 2022). Ruang untuk kebebasan berpikir dan berpendapat menjadi sangat terbatas, karena semua bentuk penyimpangan dari garis ideologi resmi negara dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan revolusi nasional. Akibatnya, Pendidikan politik pada masa itu tidak membuat masyarakat berpikir secara kritis, tetapi justru mengajarkan untuk selalu setuju dengan pandangan pemerintah. Akibatnya, cara berpikir masyarakat menjadi sempit dan seragam.

Tantangan utama yang muncul dari pendidikan politik pada masa tersebut adalah adanya ketegangan antara idealisme pendidikan sebagai alat pembebasan dan realitas politik yang represif (Hartono 2016). Meskipun pendidikan politik secara normatif ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat ideologi nasional, dalam praktiknya sering kali justru dijadikan alat legitimasi kekuasaan Presiden Soekarno dan sistem Demokrasi Terpimpin. Ketidakseimbangan ini menimbulkan dilema antara upaya membentuk warga negara yang sadar politik dengan kondisi politik yang menuntut keseragaman ideologis. Dengan demikian, meskipun pendidikan politik pada masa Orde Lama mencetak sejumlah kemajuan dalam aspek identitas nasional, namun juga meninggalkan warisan problematis dalam hal kebebasan akademik dan pluralitas pandangan politik.

## Kesimpulan

Pendidikan politik pada masa Orde Lama diarahkan sebagai alat strategis untuk memperkuat ideologi negara, khususnya melalui penerapan doktrin seperti Manipol-Usdek dan TUBAPIN. Dalam kerangka Demokrasi Terpimpin, pendidikan dimanfaatkan tidak hanya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga sebagai instrumen indoktrinasi yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme, anti-imperialisme, dan loyalitas terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Pendekatan indoktrinatif ini memiliki peran strategis dalam membangun identitas nasional dan integrasi politik, namun di sisi lain juga problematis karena menekan pluralitas, membatasi kebebasan berpikir, dan mempersempit ruang diskursus politik. Refleksi terhadap pendidikan politik pada era ini penting untuk membangun sistem pendidikan politik masa kini yang lebih demokratis, inklusif, dan menghargai keberagaman pandangan, sehingga dapat mendorong partisipasi warga negara secara kritis dan aktif dalam kehidupan politik yang sehat. Penelitian ini terbatas pada sumber pustaka dan dokumen sejarah, sehingga studi lebih lanjut berbasis lapangan atau analisis wacana kritis sangat dibutuhkan.

## Daftar Pustaka

- Adnan, I. M., Ridwan, R., Siregar, V. A., & Mubarik, M. (2022). Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)*, 2(3), 1121-1138.
- Arka, I. M., & Bima, A. A. N. A. W. (2021). Manipol Usdek Sebagai Tantangan Pendidikan Pada Jaman Reformasi Bagi Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 52-59.
- Astuti, I. T. T. (2023). Proyek Mercusuar: Langkah Politik Atau Keegoisan Soekarno Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(2), 89-99.
- Badrun, A. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pengembangan Program Pendidikan Pesantren Modern (Studi Kasus Pada Pesantren Modern Darussalam Ciamis Jawa Barat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bakry, K. et al. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Darmawan, W., Mulyana, A., & Fauzi, W. I. (2023). Renaissance Pedagogy, Dedication of Life, and the School of Life: Soekarno's Thoughts on Education. *Paramita: Historical Studies Journal* 33(2). doi:10.15294/paramita.v33i2.41342.
- Hanafi, F., & Ansorullah, A. (2021). Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 431-448. doi:10.22437/limbago.v1i3.15358.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan dan kebijakan politik (Kajian reformasi pendidikan di indonesia masa orde lama hingga reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 35-45.
- Hati, L. P., & Ginting, L. D. C. U. (2022). Segitiga kekuasaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965: sukarno, tni-ad dan partai komunis indonesia. *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(2), 161-180.
- Hidayat, D. S., & Haryono, E. (2023). *Politik dan Ideologi PDI Perjuangan 1987-1999: Penemuan dan Kemenangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Huda, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. *Idaarotul Ulum (Jurnal Prodi MPI)*, 3(1), 37-51.
- Inayah, F. (2023). Latar Belakang Lahirnya Sistem Demokrasi di Dunia dan Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2(1):123–32.
- Indrayaningtias, R., Yudho, P., & Fauzi, A. M. (2022). Kebijakan Pendidikan dan Hegemoni Kekuasaan (Studi Kasus Kebijakan Baru SBMPTN dan Kepentingan Politik Menjelang Pilpres 2019). *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 75-84.
- Judijanto, L., et al. (2025). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Nasiwan, N. (2010). Prospek Pendidikan Politik di Era Reformasi. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 10(1).
- Noor, E. et al. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1(4):679–93.

- Nurjanah, N. et al. (2021). Pembelajaran Berbasis Media Digital pada Anak Usia Dini di Era Revolusi Industri 4.0 : Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Potensia* 6(1):66–77.
- Pobela, M. (2023). Sejarah Konstitusi di Indonesia (Dari Masa ke Masa). *Jurnal Geocivic* 6(2).
- Rannie, M. (2020). Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *Simbur Cahaya* 98–117.
- Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5(1):11–33. doi:10.35457/translitera.v5i1.355.
- Suarlin, S. & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Widina.
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, kekuasaan, dan pengaruhnya pada arah sistem pendidikan nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History* 7(1):19–34.
- Supena, C. (2020). Tinjauan historis tentang pelaksanaan dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(4):683–98.
- Suprayogi, S. et al. (2024). Problematika Antara Internalisasi Dan Indoktrinasi Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 9(1), 98–106.
- Syafrudin, I., & Maiwan, M. (2023). *Politik Indonesia Kontemporer*. UNJ PRESS.
- Tambunan, W. (2020). *65 Tahun Hidup Dalam Kebhinekaan: Pandangan Kritis Dari Sisi Pendidikan Politik*. Literasi Nusantara.
- Widariyanti, C. (2022). Eksistensi Lekra dalam Pusaran Manifesto Kebudayaan Demokrasi Terpimpin. *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 18(1). doi:10.21831/istoria.v16i1.31408.